

**DAMPAK PEMBERIAN BANTUAN STIMULAN TERHADAP
PEMBERDAYAAN EKONOMI PENYANDANG DISABILITAS ALUMNI BALAI
REHABILITASI TERPADU PENYANDANG DISABILITAS YOGYAKARTA
PERSPEKTIF *MAQĀṢID SYARĪ'AH***

**Masda Tanjung¹
Dr. Anton Priyo Nugroho, S.E, M.M²**

Abstract

The Integrated Rehabilitation Center for Disabled People Yogyakarta plays a role and function of social rehabilitation for the disabled people in Special District of Yogyakarta. Such rehabilitation aims to build self-confidence and can take back the social function of disabled people. Meanwhile, the empowerment is conducted through vocational rehabilitation in the form of skill training aimed to support them to be independent. Until 2015, the assisted citizens that have graduated (alumni) had been the package of stimulant aid for the productive economic business as a capital to start an independent business. This research is conducted to observe the impact of such aid on the economic empowerment of alumni of Integrated Rehabilitation Center for Disabled People Yogyakarta.

This is a descriptive-analytical research aimed to describe and analyze the result of field research conducted in Integrated Rehabilitation Center for Disabled People Yogyakarta and a number of its alumni in the period of 2013-2015 for the vocational class of graphic design, sewing and computer. The data collected was then firstly described about the process of economic empowerment using the stimulant aid. It was then continued with the discussion of the analysis with the research focus about the economic empowerment of the alumni through the independent business. Furthermore, the result of the discussion was reanalyzed using the perspective of *maqāṣid syarī'ah*.

Once the researcher did the discussion and analysis, it can be concluded that the stimulant aid could give a positive impact on the process of economic empowerment for the alumni as the capital in starting the independent business. The alumni from the vocational class of computer experienced more drawbacks; as a consequence, the aid could not be used optimally. Meanwhile the alumni of the vocational school of graphic design and sewing only needed a little additional capital to start the independent business. The independent business they ran has brought an impact on the economic independence and could increase their social function. As seen in the perspective of *maqāṣid syarī'ah*, the economic empowerment through independent business is conducted under 5 principles: *hifz ad-Dīn*, *hifz an-Nafs*, *hifz an-Asl*, *hifz al-'Aql* and *hifz al-Mal*.

Keywords: Impact, Empowerment, Disabilities, *Maqāṣid Syarī'ah*

¹Mahasiswa Jurusan Ekonomi Islam Program Pascasarjana Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.

²Dosen Pembimbing.

A. Pendahuluan

Penyandang disabilitas sebagai kelompok marginal memerlukan perlindungan dan jaminan dari pemerintah dan masyarakat untuk dapat mengembangkan diri layaknya orang dengan kemampuan normal. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas³ merupakan dasar hukum dalam pelaksanaan pemenuhan hak bagi penyandang disabilitas, diantaranya ialah hak dibidang pendidikan, kesehatan, ekonomi, politik, budaya serta hak hidup secara mandiri. Sebelum adanya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016, pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta melalui Perda DIY nomor 4 tahun 2012 telah mengatur tentang perlindungan dan pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas. Perda ini merupakan payung hukum bagi penyandang disabilitas yang berdomisili di DIY, meskipun ada beberapa materi muatan yang sudah tidak sesuai dengan undang-undang yang terbaru yaitu UU nomor 8 tahun 2016.

Pemerintah Daerah DIY melalui Perda Nomor 4 Tahun 2012 telah menjamin perlindungan dan pemenuhan hak-hak bagi penyandang disabilitas.⁴ Melalui Dinas Sosial, pemerintah DIY menyelenggarakan rehabilitasi sosial dan pelatihan keterampilan bagi penyandang disabilitas yang bertempat di Balai Rehabilitasi Terpadu Penyandang Disabilitas (Balai RTPD) yang sebelumnya bernama Pusat Rehabilitasi Terpadu Penyandang Cacat (PRTPC). Balai RTPD Yogyakarta mempunyai peran fungsi pelayanan terpadu bagi penyandang disabilitas diantaranya rehabilitasi sosial, rehabilitasi medis, serta rehabilitasi vokasional.

Sebagai lembaga yang menangani permasalahan sosial, Balai RTPD Yogyakarta mempunyai peran untuk rehabilitasi sosial bagi penyandang disabilitas di DIY. Rehabilitasi tersebut bertujuan untuk membangun rasa percaya diri serta dapat mengembalikan fungsi sosialnya. Sedangkan pelatihan keterampilan bertujuan untuk membekali para penyandang disabilitas berupa keterampilan tertentu yang nantinya dapat menjadi modal bagi mereka untuk terjun dalam dunia kerja karena selama ini para penyandang disabilitas masih sulit mengakses dunia kerja. Adanya Balai RTPD Yogyakarta merupakan wujud pemberdayaan bagi para penyandang disabilitas. Hal

³Presiden Republik Indonesia, *Undang-Undang RI No. 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas*.

⁴Pemerintah Daerah DIY, *Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2012 Tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas*.

tersebut dikarenakan secara kompetensi dipandang berbeda dengan orang normal sehingga menyebabkan minimnya kesempatan yang diberikan oleh para pelaku usaha untuk diterima sebagai karyawan.

Data Dinas Sosial DIY menyebutkan bahwa jumlah penyandang disabilitas di DIY tahun 2016 terdapat 25.050 orang. Data tersebut merupakan data yang berasal dari data penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) yang terangkum dari semua jenis atau ragam disabilitas yang ada di DIY. Dari data tersebut dapat diklasifikasikan sesuai jenis kelamin dan asal kabupaten/ kota, berikut ini sebaran penyandang disabilitas menurut jenis kelamin serta asal daerah kabupaten/ kota di DIY.

Tabel 1 Data Sebaran Penyandang Disabilitas di DIY Tahun 2016

No	Kabupaten/ Kota	L	P	Jumlah Disabilitas	Prosentase
1	Kulon Progo	2.516	1.883	4.399	17,56 %
2	Bantul	2.954	2.483	5.437	21,71%
3	Gunungkidul	4.027	3.883	7.860	31,37%
4	Sleman	3.052	2.483	5.535	22,10%
5	Yogyakarta	1.040	779	1.819	7,26%
	Total	13.589	11.461	25.050	100%

Sumber : Laporan Kegiatan (APBD) Seksi Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas Dinas Sosial DIY, 2016

Dalam melaksanakan proses pemberdayaan, selain melakukan rehabilitasi dan bimbingan keterampilan Balai RTPD Yogyakarta juga memberikan paket bantuan stimulan. Paket bantuan stimulan untuk usaha ekonomis produktif tersebut diberikan kepada warga binaan yang telah menyelesaikan proses rehabilitasi dan pelatihan vokasional. Paket bantuan tersebut berupa alat keterampilan yang disesuaikan dengan jurusan keterampilan yang selama ini mereka ikuti. Misalnya warga binaan yang mengikuti keterampilan menjahit mendapatkan bantuan berupa mesin jahit, mesin obras dan perlengkapan jahit, sedangkan warga binaan yang mengikuti keterampilan desain grafis mendapatkan bantuan berupa komputer, printer, dan alat sablon.

Dalam naskah akademik Rancangan Peraturan Daerah No. 4 Tahun 2012 disebutkan

bahwa dalam perkembangannya, dengan kondisi kedisabilitasan seseorang sebagian besar akan mengakibatkan kemiskinan. Penyandang disabilitas banyak menghadapi hambatan dan pembatasan dalam berbagai hal sehingga sulit mengakses pendidikan yang memadai serta pekerjaan yang layak. Selain itu penyandang disabilitas sulit mendapatkan pekerjaan sebagai sumber mata pencaharian sehingga kebutuhan hidupnya banyak yang belum dapat tercukupi bahkan harus bergantung pada orang lain.

Melihat dinamika penyandang disabilitas khususnya di DIY, kiranya penelitian ini penting dilakukan untuk mengetahui sejauh mana dampak bantuan stimulan bagi pemberdayaan dan kemandirian ekonomi penyandang disabilitas. Jika stimulan tersebut dapat berdampak secara signifikan terhadap kemandirian ekonomi para penerima stimulan, maka layak program pemberian stimulan tersebut dapat diusulkan kepada pemangku kebijakan untuk tetap merekomendasikan adanya bantuan stimulan tersebut serta dianggarkan oleh Pemerintah Daerah DIY meskipun dengan bentuk program pemberdayaan lainnya. Selain itu penelitian ini penting untuk dilakukan untuk mengetahui sejauh mana pemerintah daerah mengimplementasikan peraturan perundang-undangan, peraturan daerah maupun peraturan gubernur yang berkaitan dengan pemberdayaan serta pengembangan ekonomi bagi penyandang disabilitas, sehingga mereka dapat hidup secara layak dan mandiri, tidak tergantung pada orang lain, sejahtera dan bermartabat.

Islam menjunjung tinggi keadilan dan kemanusiaan termasuk kepedulian terhadap kaum disabilitas. Negara ialah pihak yang berkewajiban untuk menyejahterakan rakyatnya termasuk rakyatnya yang mengalami disabilitas melalui berbagai program pemberdayaan. *Maqāṣid syarī'ah* sebagai konsep dari tujuan disyariatkannya hukum-hukum Allah tidak terlepas dari aspek kehidupan sosial dan ekonomi. Ditinjau dari perspektif *maqāṣid syarī'ah*, perlu diketahui apakah dampak pemberian bantuan stimulan kepada para alumni Balai RTPD Yogyakarta manfaat usaha mandiri yang dilakukan oleh para alumni Balai RTPD Yogyakarta dapat mendatangkan masalah bagi keberlangsungan hidup mereka, dalam hal *hifz ad-Dīn* (menjaga agama), *hifz an-nafs* (menjaga jiwa), *hifz al-'aql* (menjaga akal), *hifz al-mal* (menjaga harta) dan *hifz an-asl* (menjaga keturunan).

Berdasarkan uraian latar belakang masalah diatas, agar dapat menjelaskan permasalahan serta dapat mencapai tujuan sesuai tema yang dikaji, perlu adanya suatu fokus penelitian atau batasan masalah. Penelitian ini fokus membahas dampak bantuan

stimulan yang diberikan kepada alumni Balai RTPD Yogyakarta ditinjau dari perspektif *maqāṣid syarī'ah*. Penelitian ini fokus pada sembilan alumni Balai RTPD tahun 2013-2015 yang menjadi informan. Para informan berasal dari tiga keterampilan yaitu keterampilan desain grafis, menjahit dan komputer.

Berdasarkan uraian latar belakang masalah diatas, agar dapat menjelaskan permasalahan serta dapat mencapai tujuan sesuai tema yang dikaji, perlu adanya suatu fokus penelitian atau batasan masalah. Penelitian ini fokus membahas dampak bantuan stimulan yang diberikan kepada alumni Balai RTPD Yogyakarta ditinjau dari perspektif *maqāṣid syarī'ah*. Penelitian ini fokus pada sembilan alumni Balai RTPD tahun 2013-2015 yang menjadi informan. Para informan berasal dari tiga keterampilan yaitu keterampilan desain grafis, menjahit dan komputer.

Adapun pertanyaan penelitiannya adalah sebagai berikut:

- a. Bagaimana dampak pemberian bantuan stimulan terhadap pemberdayaan ekonomi alumni Balai RTPD Yogyakarta?
- b. Bagaimana dampak pemberian bantuan stimulan terhadap pemberdayaan ekonomi alumni Balai RTPD Yogyakarta perspektif *maqāṣid syarī'ah*?

B. Kerangka Teori dan Metode Penelitian

Agar peneliti mudah dalam melakukan kegiatan penelitian ini, maka perlu ada kerangka berpikir sebagai acuan dan mencegah terjadinya penyimpangan terhadap objek penelitian dan meluasnya pembahasan ke arah yang tidak signifikan. Kerangka pemikiran merupakan teori dan pendapat para ilmuwan yang tentunya berkorelasi dengan objek yang diteliti serta dapat memberikan dasar pemikiran yang kuat dalam suatu penelitian hingga diakui kebenarannya dalam mendukung suatu hipotesis. Ada beberapa konsep dan teori yang diharapkan dapat mendukung penelitian ini, yaitu teori tentang pemberdayaan, teori tentang disabilitas serta konsep tentang *maqāṣid syarī'ah*.

1. Pemberdayaan Ekonomi

Pemberdayaan berasal dari kata “daya” atau kekuatan. Sedangkan pemberdayaan berarti upaya untuk memperoleh kekuatan. Konsep pemberdayaan di Indonesia mengadopsi dari bahasa Inggris yaitu dari kata “*empowerment*”. Konsep tersebut lahir

dari perkembangan masyarakat dan kebudayaan Eropa yang muncul pada dekade 70-an yang terus berkembang sampai saat ini.⁵

Menurut Jo Rowldan, pemberdayaan ialah proses dimana individu, organisasi atau kelompok yang dalam kondisi tidak berdaya atau lemah (*powerless*) menjadi sadar dan tahu (*having knowledge*) dengan dinamika kekuasaan, membangun keterampilan dan kapasitas untuk memperoleh kontrol pada kehidupan mereka serta menjalankan kontrol tanpa mengganggu hak-hak oranglain.⁶ Sedangkan menurut Mardi, pemberdayaan ekonomi ialah usaha untuk menjadikan ekonomi yang kuat, besar, modern, dan dapat berdaya saing tinggi dalam mekanisme pasar yang benar. Karena kendala pengembangan ekonomi rakyat adalah kendala struktural, maka pemberdayaan ekonomi rakyat harus dilakukan melalui perubahan konsep struktural.⁷

Untuk mengetahui sejauh mana keberhasilan dalam proses pemberdayaan maka perlu adanya indikator sebagai acuan keberhasilan. UNICEF mengajukan lima dimensi sebagai tolak ukur keberhasilan pemberdayaan masyarakat, terdiri dari kesejahteraan, akses, kesadaran kritis, partisipasi dan kontrol. Lima dimensi tersebut adalah kategori analisis yang bersifat dinamis, satu sama lain berhubungan secara sinergis, saling menguatkan dan melengkapi. Schuler, Hashemi dan Riley mengembangkan beberapa indikator pemberdayaan, yang mereka sebut sebagai empowerment index atau indeks pemberdayaan:⁸

- 1) Kebebasan mobilitas, yaitu kemampuan individu menuju akses tempat umum;
- 2) Kemampuan membeli komoditas ‘kecil’, yaitu kemampuan individu untuk membeli barang-barang kebutuhan pokok sehari-hari dan kebutuhan pribadi;
- 3) Kemampuan membeli komoditas ‘besar’, yaitu kemampuan individu untuk membeli barang-barang sekunder atau tersier;

⁵Bagong Suyanto, *Pemberdayaan Komunitas Marginal di Perkotaan* dalam Moh. Aziz et all, *Dakwah Pemberdayaan Masyarakat*, (Yogyakarta : PT LKIS Pelangi Aksara, 2005). hlm. 169.

⁶Jo Rowldan dalam Buchori, A, Sanusi, dan SR. Amelia (Editor). *Hanya Sebuah Langkah, Bukan Akhir Perjalanan*. (Bogor: PWD-IPB, 2003).

⁷Hutomo Mardi Yatmo, *Strategi Pemberdayaan Masyarakat*, (Bandung, Humaniora, 2000), hlm. 11.

⁸Edi Suharto, *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat: Kajian Strategis Pembangunan Kesejahteraan & Pekerja Sosial*. (Bandung : PT Refika Aditama, 2005), hlm. 63-66.

- 5) Terlibat dalam pembuatan keputusan-keputusan rumah tangga, seperti mampu membuat keputusan secara sendiri maupun bersama pasangannya mengenai keputusan-keputusan keluarga;
- 6) Kebebasan relatif dari dominasi keluarga: responden ditanya mengenai apakah dalam satu tahun terakhir ada seseorang (suami, istri, anak-anak, mertua) yang mengambil uang, tanah, perhiasan dari dia tanpa ijinnya; yang melarang mempunyai anak; atau melarang bekerja di luar rumah;
- 7) Kesadaran hukum dan politik, seperti mengetahui nama salah seorang pegawai pemerintah desa/kelurahan; seorang anggota DPRD setempat; nama presiden; mengetahui pentingnya memiliki surat nikah dan hukum-hukum waris;
- 8) Keterlibatan dalam kampanye dan protes-protes, yaitu seseorang dianggap 'berdaya' jika ia pernah terlibat dalam kampanye atau bersama orang lain melakukan protes, misalnya, terhadap suami yang memukul istri; istri yang mengabaikan suami dan keluarganya; gaji yang tidak adil; penyalahgunaan bantuan sosial; atau penyalahgunaan kekuasaan polisi dan pegawai pemerintah; dan
- 9) Jaminan ekonomi dan kontribusi terhadap keluarga, seperti memiliki rumah, tanah, aset produktif, tabungan.

2. Disabilitas

Undang-Undang No. 8 Tahun 2016 mendefinisikan penyandang disabilitas ialah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental dan/ atau sensorik dalam jangka waktu yang lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak. Sedangkan dalam Perda DIY No. 4 Tahun 2012, penyandang disabilitas didefinisikan sebagai orang yang mengalami gangguan, kelainan, kerusakan, dan/atau kehilangan fungsi organ fisik, mental, intelektual atau sensorik dalam jangka waktu tertentu atau permanen dan menghadapi hambatan lingkungan fisik dan sosial.

Penyandang disabilitas menjadi kelompok yang rentan terhadap kemiskinan karena hambatan struktur sosialnya dalam kehidupan masyarakat. Selain itu juga karena latar belakang pendidikan masih rendah serta hambatan aksesibilitas untuk mengembangkan diri, menyebabkan para penyandang disabilitas sulit mengakses kesempatan kerja serta secara formal maupun non formal. Hal yang demikian berakibat pada kondisi sosial dan ekonomi yang rentan terhadap kemiskinan. Oleh karena itu pemberdayaan bagi penyandang disabilitas perlu digalakkan agar mereka dapat kembali menjalankan keberfungsian sosialnya. Proses pemberdayaan tersebut sebaiknya dapat dilakukan secara menyeluruh dari segala aspek, sehingga disabilitas akan jauh dari identitas kemiskinan.

Menurut Kementerian Sosial RI, pemberdayaan sosial dilaksanakan melalui sejumlah kegiatan, yaitu:

- a. Memfasilitasi penyandang disabilitas untuk melaksanakan magang di suatu perusahaan. Tujuan dari magang ini ialah agar para penyandang disabilitas memiliki pengetahuan dan pengalaman di dunia kerja;
- b. Pembentukan Kelompok Usaha Bersama (KUBE) bagi eks penerima pelayanan di panti-panti sosial; dan
- c. Pembentukan usaha ekonomis produktif (UEP).

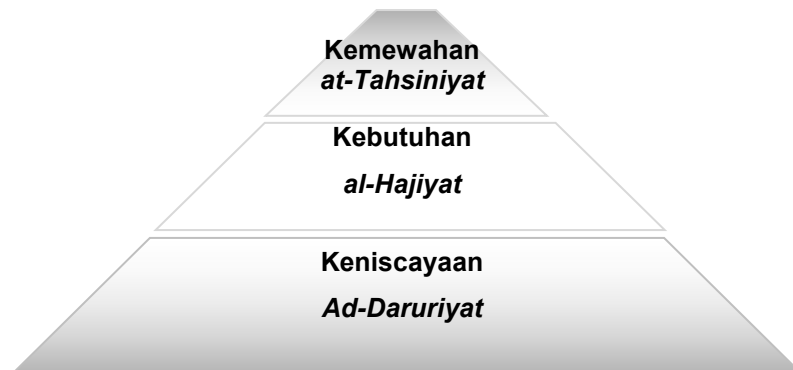
3. Perspektif *Maqāṣid Syarī'ah*

Pada penelitian ini analisis pembahasan hasil penelitian akan menggunakan perspektif *maqāṣid syarī'ah*, sejauh mana dampak pemberian stimulan bagi penyandang disabilitas tersebut dapat memenuhi prinsip-prinsip *maqāṣid syarī'ah*. Agar objek penelitian dapat dilihat dari perspektif *maqāṣid syarī'ah* maka perlu adanya suatu teori yang mendukung. Teori yang digunakan dalam penelitian ini ialah teori *maqāṣid* pemikiran Imam al-Syatibi. Dalam hal ini al-Syatibi lebih mengupayakan dalam memantapkan maslahat sebagai unsur terpenting dari tujuan-tujuan hukum yang bersumber dari Al- Qurān dan Hadits. Kemaslahatan itu dapat diwujudkan apabila lima unsur pokok yang terdiri dari agama, jiwa, keturunan, akal, dan harta dapat diwujudkan dan dipelihara. Dalam mewujudkan dan memelihara lima

unsur pokok tersebut, maka al-Syatibi membagi kedalam tiga tingkatan tujuan syari'ah yaitu *maqāṣidal-daruriyat*, *maqāṣid al-hajiyat*, dan *maqāṣidal-tahsiniyat*.⁹

Maqāṣid syarī'ah berarti tujuan Allah dan Rasul-Nya dalam merumuskan hukum-hukum Islam. Tujuan itu dapat ditelusuri dalam ayat-ayat Al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah sebagai alasan logis bagi rumusan suatu hukum yang berorientasi kepada kemaslahatan umat manusia. Sebagaimana dikemukakan oleh Abu Ishaq al-Syatibi bahwa tujuan pokok disyariatkan hukum Islam adalah untuk kemaslahatan manusia baik di dunia maupun di akhirat. Kemaslahatan yang akan diwujudkan itu menurut al-Syatibi terbagi kepada tiga tingkatan yang telah disebutkan di atas.¹⁰

Ketiga tingkatan *maqāṣid syarī'ah* merupakan jenjang prioritas tujuan syari'ah dapat digambarkan dalam piramida di bawah ini :¹¹



Gambar 2 Piramida Jenjang *Maqāṣid Syarī'ah*

Sumber : Al Maqasid untuk Pemula, 2013

Kebutuhan primer (*dharuriyah*) adalah prinsip-prinsip yang harus dilaksanakan demi keberlangsungan urusan agama dan keduniaan dengan baik. Terbaikannya prinsip ini akan mengakibatkan kerusakan di dunia dan siksaan di akhirat. Imam al-Syatibi dalam karyanya *al-Muwafaqat fi Ushul asy Syarī'ah* melandaskan kebutuhan primer (*daruriyyah*) pada lima pilar (*daruriyyah al khomsah*), yakni: *hifz ad-Dīn*

⁹Asafri Jaya Bakri, *Konsep Maqāṣid syarī'ah menurut Al-Syatibi*. (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1996). hlm. 71-72.

¹⁰Abu Ishaq al-Syatibi, *Al-Muwafaqat*, jilid 1-2. (Bairut: Darul Ma'rifah, 1997). hlm. 324.

¹¹Jaser Audah, *Al Maqasid untuk Pemula*, terj. (Yogyakarta: SUKA Press, 2013). hlm. 11.

(menjaga agama), *hifz an-nafs* (menjaga jiwa), *hifz al-'aql* (menjaga akal), *hifz al-mal* (menjaga harta) dan *hifz an-asl* (menjaga keturunan).

Penelitian ini bersifat kualitatif, dengan menggunakan *field research* peneliti terjun langsung ke lapangan yang menjadi objek penelitian. Dalam hal ini peneliti akan bertatap muka langsung dengan objek penelitian. Untuk memperoleh data-data, peneliti melakukan wawancara dengan objek penelitian yang berkaitan dengan masalah yang sedang diteliti, yaitu kepada pengelola Balai RTPD Yogyakarta dan penyandang disabilitas alumni Balai RTPD Yogyakarta.

Hasil perolehan data penelitian kemudian dideskripsikan secara jelas disertai dengan data pendukung seperti gambar dan dokumen. Dari pembahasan tersebut akan diperoleh hasil kemudian dianalisis dengan menggunakan teori yang ada apakah sudah sesuai dengan indikator keberhasilan pemberdayaan atau belum. Selanjutnya pembahasan hasil penelitian dikupas menggunakan perspektif *maqāṣid syarī'ah* dan prinsip kemaslahatan, yaitu bagaimana dampak pemberian stimulan kepada para alumni melalui pemberdayaan ekonomi tersebut dapat memenuhi tujuan *maqāṣid syarī'ah*.

B. Hasil Penelitian dan Pembahasan

1. Hasil Penelitian

Dalam penelitian ini terdapat dua unsur informan yang dijadikan sebagai sumber informasi yaitu Pengelola Balai RTPD Yogyakarta yang berasal dari Pejabat Struktural dan Fungsional Pekerja Sosial, kemudian alumni Balai RTPD Yogyakarta, dengan menggunakan teknik pemilihan subyek penelitian (informan) model *criterion-based selection*, yang didasarkan pada asumsi bahwa subyek tersebut sebagai aktor dalam tema penelitian ini. Adapun deskripsi informan sebagai berikut :

a) Pengelola Balai RTPD Yogyakarta

No	Nama	L/P	Usia	Jabatan	Pendidikan
1	Slamet, S.Sos., M.Si	L	53 tahun	Kepala Balai RTPD	S2

2	Drs. Suprih Waluya	L	52 tahun	Kepala Seksi Bina Daksa dan Ruguwicara	S1
3	Srihartinnovmi, S.Pi., M.Si	P	48 tahun	Pekerja Sosial Ahli Madya	S2

b) Alumni Balai RTPD Yogyakarta

1) Alumni Kelas Vokasional Desain Grafis

No.	Nama	L/P	Tahun Lulus	Usia	Pendidikan
1.	Ladyoga Anang B.	L	2015	22 th	SMP
2.	Septiana Eka Nurjanah	P	2014	23 th	SMK
3.	Budi Raharja	L	2014	45 th	D3

2) Alumni Kelas Vokasional Menjahit

No.	Nama	L/P	Tahun Lulus	Usia	Pendidikan
1.	Ponidi	L	2013	38 th	SMP
2.	Syaiful Islam	L	2013	29 th	SD
3.	Wahyu Suthiyana L.	P	2014	25 th	SD

3) Alumni Kelas Vokasional Komputer

No.	Nama	L/P	Tahun Lulus	Usia	Pendidikan
1.	Widya Tri Mardiatun	P	2015	28 th	SMA
2.	Devi Karina Lucia	P	2015	24 th	SMA
3.	Nurul Rahmania S.	P	2015	24 th	SMALB

C. Pembahasan

1. Dampak Pemberian Bantuan Stimulan terhadap Pemberdayaan Ekonomi Alumni Balai RTPD Yogyakarta

a. Pemberdayaan Ekonomi Alumni Balai RTPD Yogyakarta Melalui Usaha Mandiri

Para alumni yang telah menerima paket bantuan kemudian ada yang secara langsung memulai usaha namun ada juga yang menunggu peluang usaha serta modal usaha. Selain itu juga ada beberapa faktor yang menghambat para alumni diantaranya ialah modal usaha dan tempat usaha. Menurut Bapak Slamet, selaku Kepala Balai mengungkapkan bahwa para alumni yang akan memulai usaha biasanya menemui beberapa hambatan, tertuma ialah hambatan modal awal, seperti yang ia utarakan :¹²

“Pemanfaatan bantuan stimulan dalam arti mereka usaha mandiri selama ini kalau menurut pengamatan kita memang ada beberapa kendala khususnya mereka dalam memulai usaha. Tidak serta merta setelah mereka lulus kemudian memulai usaha, karena dari sekian alumni tersebut mempunyai kendala yang berbeda-beda. Kendala yang mereka hadapi biasanya adalah modal awal untuk memulai usaha, karena untuk memulai usaha tidak cukup hanya bermodalkan stimulan saja, harus difikirkan perlengkapannya, tempat serta yang paling penting ialah keberanian para alumni untuk memulai usaha.”

Pernyataan dengan pengelola Balai RTPD Yogyakarta sesuai dengan pernyataan Septi, alumni keterampilan desain grafis, bahwa modal menjadi salah satu kendala dalam memulai usaha. Hal tersebut diungkapkan oleh Septi :¹³

“Pertama ialah modal, kedua ialah pelanggan yang masih sedikit...”

Pernyataan tersebut berbeda dengan keterangan yang disampaikan oleh Kiki, alumni keterampilan jahit, bahwa modal bukan menjadi kendala utama melainkan kendala transportasi untuk membeli bahan dan perlengkapan usaha jahit, selain itu juga masih sedikitnya pelanggan, seperti yang ia sampaikan :¹⁴

¹² Wawancara dengan Slamet, S.Sos., M.Si di Yogyakarta, tanggal 21 Oktober 2017.

¹³ Wawancara dengan Septiana Eksa Nurjanah di Yogyakarta, tanggal 10 Oktober 2017.

¹⁴ Wawancara dengan Wahyu Suthiyana Lestari (Kiki) di Yogyakarta, tanggal 26 Oktober 2017.

“Dulu yang jadi kendala mungkin transportasi dalam membeli bahan-bahan jahit karena saya tidak dapat mengendarai motor, jadi biasanya saya titip sama teman. Selain itu mungkin pelanggan belum banyak sehingga perlu promosi.”

Sedangkan menurut Ibu Titin, dalam memulai usaha, para alumni perlu dukungan dari berbagai pihak diantaranya keluarga, masyarakat dan perangkat desa setempat. Keluarga berhubungan dengan modal, masyarakat berkaitan dengan memberi kepercayaan terhadap usaha yang dijalankan oleh alumni, sedangkan perangkat desa bertugas memberikan pendampingan dan pengarahan yang berkaitan dengan program pengembangan usaha, seperti yang ia ungkapkan :¹⁵

“Mereka kita datangi dan kita monitor bagaimana selama ini mereka dalam menjalankan usaha. Tidak tanggungjawab kita seratus persen untuk membimbing mereka, tapi juga tanggungjawab keluarga, masyarakat maupun perangkat desa yang ada di tempat tinggal para alumni.”

Para alumni yang telah memiliki usaha, termotivasi untuk dapat mengembangkan usahanya agar lebih maju. Budi yang saat ini menjalankan usaha mandiri di Galeri Balai RTPD Yogyakarta berupa jasa desain, percetakan dan sablon seperti undangan pernikahan, souvenir, kartu nama, spanduk dan sablon kaos. Usaha yang didirikannya sejak satu setengah tahun yang lalu ini diberi nama “Gallery 5”. Dalam menjalankan usahanya ia bekerja sama dengan tempat usaha percetakan yang lain sebagai patner kerja.

Informan Anang memiliki pelanggan tetap sebanyak lima belas orang. Sedangkan omset usahanya saat ini per bulan sekitar satu setengah juta rupiah dan penghasilan bersihnya sebesar tujuh ratus ribu rupiah per bulan. Penghasilan tersebut digunakan untuk membantu biaya hidup bersama istrinya yang juga bekerja sebagai penjahit di perusahaan konveksi, seperti yang ia ungkapkan:¹⁶

“Kurang lebih satu setengah juta rupiah. Penghasilan bersih sekitar lima ratus sampai tujuh ratus ribu rupiah. Alhamdulillah paling tidak bisa membantu suami dalam mencukupi kebutuhan sehari-hari.”

¹⁵Wawancara dengan Srihartinnovmi, M.Si di Yogyakarta, tanggal 20 Oktober 2017.

¹⁶Wawancara dengan Ladyoga Anang B. di Yogyakarta, tanggal 9 Oktober 2017.

Sedangkan menurut Ponidi, selama beberapa tahun ia menjalankan usahanya ia mengaku telah mengalami perkembangan. Untuk tempat usaha, dulu ia ikut tinggal bersama saudaranya. Saat ini setelah ia mempunyai pelanggan tetap dan pemasukan, ia menyewa sebuah kios di pinggir Jalan Imogiri Timur di daerah Wukirsari, Imogiri. Usaha penjahitannya ia beri nama HAN'S Collection bekerjasama dengan Syaiful, teman seangkatannya. HAN'S Collectio menerima jasa penjahitan berbagai jenis pakaian dan vermak dan saat ini sedang membuat tas dari bahan kain perca untuk pameran. Untuk menambah perlengkapan jahitnya, ia membeli berbagai peralatan jahit termasuk mesin jahit yang mempunyai kapasitas kerja lebih baik serta beberapa perlengkapan lain seperti boneka maneukin dan etalase. Dari usaha yang ia jalankan saat ini, penghasilannya sekitar satu juta rupiah.

Untuk mengembangkan usahanya, ia memanfaatkan jasa keuangan BMT untuk menambah modal. Selain itu ia bekerjasama dengan perusahaan konveksi untuk menambah produksi dan pemasukan. Untuk mengenalkan hasil usahanya kepada masyarakat luas, beberapa kali ia mengikuti pameran. Ia mengaku selama ini mendapat bimbingan dan pembinaan lanjut dari Balai RTPD. Ia juga beberapa kali mengikuti pertemuan alumni sebagai media informasi sesama alumni dan pengembangan usaha. Belum lama kemarin kami juga mengikuti program revitalisasi menjahit tingkat terampil sebagai tambahan ilmu dan pengembangan kemampuan, seperti yang ia ungkapkan :¹⁷

b. Dampak Pemberdayaan Ekonomi Alumni Balai RTPD Yogyakarta

1) Mobilitas dan Akses

Salah satu dampak pemberdayaan ekonomi para alumni Balai RTPD ialah bertambahnya kemampuan secara sosial dan finansial. Hal tersebut mempengaruhi kemampuan mobilitas dan akses, contohnya dengan mempunyai usaha maka mereka harus belanja bahan dan perlengkapan usaha serta berkunjung ke rekanan untuk melakukan kerjasama.

¹⁷*Ibid.*

2) Kesejahteraan dan Daya Beli

Dari semua informan dapat diperoleh informasi bahwa dampak pemberdayaan ekonomi melalui usaha mandiri tersebut mampu meningkatkan daya beli terhadap kebutuhan pokok sehingga dapat memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Sedangkan untuk kebutuhan sekunder maupun tersier dapat dijangkau oleh sebagian alumni, seperti dapat membeli motor setengah pakai, memodifikasinya serta ada yang mampu membeli laptop. Pada dasarnya para alumni lebih mengutamakan pengembangan usahanya terlebih dulu daripada membeli barang-barang yang belum dibutuhkan.

3) Partisipasi dan Sadar Politik Hukum

Dampak pemberdayaan alumni Balai RTPD dilihat dari partisipasi dan kesadaran politik dan hukum secara spesifik kurang terlihat secara jelas karena sebagian besar alumni saat mengikuti rehabilitasi dan bimbingan di Balai RTPD Yogyakarta telah dibekali dengan pengetahuan tentang partisipasi politik dan hak hukum penyandang disabilitas. Agar para penyandang disabilitas paham administrasi kependudukan dan dapat mengurus sesuatu yang berkaitan dengan hal tersebut secara mandiri.

4) Jaminan Ekonomi dan Kontribusi terhadap Keluarga

Sebagai penyandang disabilitas yang telah hidup mandirialagi sebagai kepala keluarga tentu memiliki tanggungjawab dan andil besar terhadap keberlangsunga hidup istri dan anaknya. Kontribusi yang diberikan kepada keluarga menjadikan para alumni mempunyai eksistensi diri sebagai manusia dan berkontribusi dalam pembangunan sosial masyarakat. Kemandirian secara ekonomi pada dasarnya juga akan mengurangi ketergantungan hidup pada orang lain di sekitarnya.

2. Dampak Pemberian Bantuan Stimulan terhadap Pemberdayaan Ekonomi Alumni Balai RTPD Yogyakarta Perspektif *Maqāṣid Syarī'ah*

Pemberdayaan bagi penyandang disabilitas yang dilakukan oleh Balai RTPD Yogyakarta merupakan usaha untuk membuat para alumni menjadi berdaya dan hidup mandiri. Para alumni yang telah mandiri diharapkan dapat *survive* menjalani

kehidupan sesuai fungsi sosialnya dalam masyarakat serta dapat mencukupi kebutuhan ekonominya. Dengan tercukupi kebutuhan ekonominya maka kebutuhan dasar sebagai manusia akan terpenuhi juga. *Maqāṣid syarī'ah* dalam terjemahan secara luas tidak hanya sebagai asas pembentukan hukum namun juga melingkupi pokok-pokok kemaslahatan hidup manusia. Pokok-pokok kehidupan yang harus dijaga tersebut tercermin dalam kebutuhan primer (*dharuriyah*) yaitu prinsip-prinsip yang harus dilaksanakan demi keberlangsungan urusan agama dan keduniaan dengan baik. Kelima prinsip tersebut ialah *hifz ad-Din* (menjaga agama), *hifz an-nafs* (menjaga jiwa), *hifz an-asl* (menjaga keturunan), *hifz al-'aql* (menjaga akal) dan *hifz al-mal* (menjaga harta). Dilihat dari perspektif *maqāṣid syarī'ah* maka dampak pemberian paket stimulan terhadap pemberdayaan ekonomi dapat dijelaskan sebagai berikut :

a. Menjaga agama (*Hifz Ad-Dīn*)

Secara umum dampak yang dirasakan informan saat ini dengan meningkatnya kondisi ekonomi dan sosialnya semakin menambah rasa kebersyukuran dan motivasi untuk menjalankan amalan agama lebih giat. Meyakini agama sebagai jalan hidup membuat mereka dapat memposisikan diri sebagai hamba seutuhnya. Hal tersebut pada dasarnya telah membuat mereka merasa sebagai manusia yang memiliki kebebasan dalam menjalankan ritual agamanya terlepas dari keterbatasan fisik yang dimilikinya.

b. Menjaga Jiwa (*Hifz An-Nafs*)

Berkaitan dengan dampak stimulan terhadap pemberdayaan ekonomi alumni Balai RTPD Yogyakarta, bahwa dengan aktivitas pemberdayaan tersebut menjadi sumber penghasilan para alumni. Penghasilan tersebut kemudian dapat yang dapat menjadi sarana bagi mereka untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Kebutuhan hidup seperti biaya makan dan biaya kesehatan merupakan kebutuhan primer yang harus dipenuhi. Hal tersebut merupakan suatu usaha untuk memelihara kesehatan fisik yang tentu akan berpengaruh pada kesehatan jiwa.

Pembahasan diatas menandakan bahwa bantuan stimulan yang kemudian dimanfaatkan untuk usaha mandiri tersebut berdampak pada usaha memelihara jiwa. Usaha memelihara jiwa tersebut berupa usaha mandiri yang menghasilkan keuntungan untuk biaya hidup kemudian harapan untuk mengembangkan usaha akan menjauhkan diri dari sikap berputus asa. Dengan begitu para penerima bantuan stimulan dapat bertahan hidup dari usaha yang dijalankannya, sehingga sesuai dengan prinsip *hifz an-Nafs*.

c. Menjaga akal (*Hifz Al-'Aql*)

Berkaitan dengan dampak bantuan stimulan terhadap pemberdayaan ekonomi bahwa Islam menjaga kemerdekaan berpikir, bersikap dan mengembangkan bakat dan minat, hal tersebut diwujudkan dalam kegiatan usaha yang dijalani atas keinginan untuk berkembang. Para alumni yang saat ini menjalankan usahanya harus dilandasi oleh kemauan dan kehendak serta didasari cara berpikir yang matang.

Menurut pembahasan, dampak bantuan stimulan dalam rangka memelihara akal berkaitan erat dengan kesempatan mengembangkan ide dan potensi para alumni. Penyandang disabilitas yang rentan terhadap kurangnya akses pendidikan pun setelah adanya program pemberdayaan dari Balai RTPD Yogyakarta melalui rehabilitasi dan pelatihan menjadi terbuka pikiran dan potensi yang dimilikinya. Hal yang demikian membuat para alumni terbebas dari ketidakberdayaan akal serta menutup diri dari dunia luar. Memelihara akal sama saja dengan memelihara manusia agar tidak menjadi beban sosial, tidak menjadi sumber kejahatan dan penyakit di dalam masyarakat, akan tetapi membuat mereka dapat bermanfaat bagi lingkungan serta berpartisipasi dalam pembangunan bangsa dan negara.

d. Menjaga harta (*Hifz Al-Māl*)

Berkaitan dengan dampak bantuan stimulan yang diberikan kepada para alumni Balai RTPD Yogyakarta ialah bantuan yang dimanfaatkan untuk usaha mandiri tersebut secara langsung dapat dirasakan hasilnya berupa pemasukan

dari usaha yang dijalankannya. Oleh karena itu para alumni telah berusaha untuk memperoleh harta dengan cara yang halal. Usaha yang mereka jalankan secara riil dapat dijadikan mata pencaharian sehingga kebutuhan sehari-hari dapat terpenuhi. Dengan adanya mata pencaharian yang utama maka mereka akan terhindar dari perbuatan jahat seperti mencuri, menipu dan cara batil lainnya dalam mendapatkan harta.

Dari pembahasan, terlihat bahwa dampak bantuan stimulan dapat memenuhi prinsip *hifz al-māl*, yaitu para alumni dapat memulai usaha sebagai sumber penghasilan untuk memperoleh harta. Selain itu mereka juga dapat terhindar dari cara-cara mendapatkan harta dengan jalan yang batil. Dengan demikian usaha pemberdayaan melalui bantuan stimulan tersebut sesuai tujuan disyariatkannya agama ini yaitu memelihara harta.

e. Menjaga Keturunan (*Hifz An-Nasl*)

Berkaitan dengan dampak pemberian bantuan stimulan oleh Balai RTPD Yogyakarta, bahwa dengan adanya usaha yang dilakukan oleh alumni penerima bantuan, mereka dapat mengembangkan potensi sosialnya dengan menikah maupun memelihara anak keturunan secara normal. Sebagian besar penyandang disabilitas mempunyai tingkat kepercayaan diri yang rendah sehingga seringkali dalam pergaulan sosial mengalami hambatan. Penyandang disabilitas yang telah mempunyai eksistensi diri seperti bekerja atau memiliki usaha akan lebih percaya diri dan dapat menjalankan fungsi sosialnya seperti menikah dan berkeluarga.

Anak merupakan amanah dari Allah swt., sehingga mereka sebagai orangtua bertanggungjawab penuh dalam proses mengasuh, mendidik dan membimbingnya agar tidak menjadi anak yang lemah. Pendidikan dimulai dari keluarga kemudian lingkungan dan lembaga pendidikan formal melalui penanaman nilai-nilai moral dan agama. Mereka meyakini membekali anak-anaknya dengan karakter dan keahlian yang baik agar dapat *survive* menghadapi kehidupan serta dapat bahagia di dunia dan akhirat. Para alumni yang telah memiliki usaha mandiri bermodalkan bantuan stimulan dapat

menghasilkan pendapatan. Penghasilan tersebut dimanfaatkan untuk membiayai kebutuhan hidup keluarga dan pendidikan anaknya dengan baik, sehingga program bantuan stimulan sesuai dengan prinsip *hifz An-nasl* yaitu memelihara keturunan.

D. Kesimpulan

Dari pembahasan di atas peneliti dapat menyimpulkan hasil penelitian ini sebagai berikut :

Para alumni Balai RTPD Yogyakarta telah memanfaatkan bantuan stimulan untuk memulai usaha mandiri. Sedangkan beberapa informan yang merupakan alumni kelas komputer belum ada yang menjalankan usaha mandiri karena terkendala jenis dan modal usaha, sehingga beberapa dari mereka bekerja di tempat usaha oranglain. Dalam memulai usaha, sebagian alumni menemui beberapa kendala seperti belum adanya modal untuk membeli bahan perlengkapan usaha, selain itu juga beberapa alumni juga terkendala dengan tempat usaha, terutama bagi rumahnya yang kurang strategis untuk dijadikan tepat usaha. Namun sebagian besar alumni mendapat dukungan keluarga berupa modal usaha, terutama alumni keterampilan desain grafis dan menjahit yang tidak banyak membutuhkan tambahan modal. Kegiatan monitoring dan evaluasi dilakukan untuk memantau perkembangan para alumni dalam melakukan usaha mandiri, kegiatan tersebut berupa bimbingan dan pembinaan lanjut (binjut) dari petugas Balai RTPD Yogyakarta. Selain itu juga terdapat program peningkatan kemampuan seperti pelatihan revitalisasi menjahit tingkat terampil. Untuk mengembangkan usaha terdapat alumni yang menggunakan jasa pinjaman modal dari lembaga keuangan (BMT). Dengan usaha mandiri para alumni dapat mengembangkan potensi yang dimilikinya, sehingga mereka dapat berdaya dan mempunyai mata pencaharian. Kemandirian ekonomi membuat kepercayaan diri mereka meningkat sehingga dapat menjalankan fungsi sosialnya dalam masyarakat. Dengan adanya pendapatan ekonomi dan meningkatnya fungsi sosial tersebut berdampak pada meningkatnya kesejahteraan keluarga para alumni.

Ditinjau dari perspektif *Maqāṣid syarī'ah*, dampak bantuan stimulan memberdayaan ekonomi penyandang disabilitas alumni Balai RTPD Yogyakarta telah sesuai dengan kelima prinsip *Maqāṣid syarī'ah* yaitu Menjaga Jiwa (*Hifz An-Nafs*), Menjaga akal (*Hifz Al-'Aql*), Menjaga harta (*Hifz Al-Māl*) dan Menjaga Keturunan (*Hifz An-Nasl*)

E. Saran

Dari hasil pembahasan di atas, peneliti memberikan saran sebagai berikut: Bagi Alumni Balai RTPD dapat memperbanyak pergaulan dengan sesama pelaku usaha yang telah maju serta melakukan kerjasama apabila memungkinkan dan melakukan inovasi berkaitan dengan metode promosi dan pemasaran agar pelanggan semakin bertambah. Bagi Pengelola Balai RTPD dapat memperbanyak materi tentang kewirausahaan sebagai bekal para warga binaan dalam memulai usaha mandiri serta perlu melakukan evaluasi dan pengembangan program rehabilitasi vokasional khususnya pada kelas keterampilan komputer. Evaluasi menyangkut program, metode, kurikulum dan orientasi jenis usaha agar para lulusan benar-benar dapat mengaplikasikan keterampilan tersebut sesuai dengan kebutuhan pasar. Bagi pemerintah yang berwenang, perlu adanya kebijakan afirmatif (*affirmative policy*) dari pemerintah pusat (Kementerian Sosial) maupun daerah (Dinas Sosial) berkaitan dengan bantuan pengembangan usaha bagi penyandang disabilitas dengan mempermudah regulasi dalam mengakses bantuan tersebut.

F. Daftar Pustaka

- Ali Azis, Moh. 2005. *Pendekatan Sosio-Kultural dalam Pemberdayaan Masyarakat*, dalam Rr. Suhartini et all, *Model-Model Pemberdayaan Masyarakat*, Yogyakarta: PT. LkiS Pelangi Aksar.
- Al-Mursi Husain Jauhar, Ahmad. 2017. *Maqashid Syariah*. Jakarta: Amzah.
- Al-Syatibi, Abu Ishaq. 1997. *Al-Muwafaqat*, jilid 1-2. Bairut: Darul Ma'rifah .
- Amin, Muhammad. 2015. *Pemberdayaan Masyarakat Marginal Dalam Perspektif Al-Qurān*. In *Pemberdayaan Masyarakat Marginal*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar dan LABSA UIN Sunan Kalijaga.
- Anwar, 2007. *Manajemen Pemberdayaan Perempuan*. Bandung : Alfabeta.

- Audah, Jaser. 2013. *Al Maqasid untuk Pemula*, terj. Yogyakarta: SUKA Press
- Baidhawiy, Zakiyuddin. 2010. *Rekonstruksi Keadilan, Etika Sosial-Ekonomi Islam untuk Kesejahteraan Universal*. Salatiga: STAIN Salatiga Press.
- Baqir Al-Shadr, Muhammad. 2008. *Buku Induk Ekonomi Islam*, terj. Iqtishaduna. Jakarta: Zahra
- Black, J.A. dan D. J. Champion. 2001. *Metodedan Penelitian Masalah Sosial*. Bandung: PT. Refika Aditama.
- Budi Santoso, Achmad. 2013. Solidaritas Virtual Dan Pemberdayaan Difabel Dalam Blogosphere Indonesia. *Jurnal Paradigma*, Nomor 1 Volume 3.
- Bungin, B. 2006. *Analisis Data Penelitian Kualitatif*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada
- Daming, Saharuddin. 2011. *Menakar Kebijakan Publik terhadap Upaya Perlindungan dan Pemenuhan Hak-Hak Dasar Kemanusiaan bagi Penyandang Disabilitas di Indonesia*, dalam Jurnal Perempuan, No. 69/2011.
- Departemen Agama RI, *Al-Qurān dan Terjemahnya*. Bandung: Diponegoro
- Gubernur DIY, *Peraturan Gubernur DIY Nomor 40 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Pergub DIY Nomor 36 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tatakerja Unit Pelaksana Teknis darah dan Unit Pelaksana Teknis Lembaga daerah Istimewa Yogyakarta*.
- Jaya Bakri, Asafri. 1996. *Konsep Maqasidsyari'ah menurut Al-Syatibi*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada
- Kasroni, Encep. 2003. "Mencari Format Menuju Keberdayaan Ekonomi Penyandang Cacat". *Tesis*. Program Pascasarjana Universitas Udayana Bali.
- Khoirul Hadi , M. 2016. Fikih Disabilitas, Studi Tentang Hukum Islam Berbasis Maṣlaḥah. *Jurnal Palastren*, Jurnal Studi Gender, Vol 9, No 1. Kudus: Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Kudus.
- Mardi Yatmo, Hutomo. 2000. *Strategi Pemberdayaan Masyarakat*. Bandung, Humaniora.
- Mubyarto. 1997. *Ekonomi Rakyat, Program IDT dan Demokrasi Ekonomi Indonesia*, Yogyakarta: Aditya Media
- Nur Sayyidah, Ani. 2015. Dinamika Penyesuaian Diri Penyandang Disabilitas di Tempat Magang Kerja: Studi Deskriptif di Balai Rehabilitasi Terpadu Penyandang Disabilitas (BRTPD) Yogyakarta. *Jurnal Inklusi*, Journal of Disability Studies, Volume 2 No. 1. Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga.

- Pemerintah Daerah DIY, *Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2012 Tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas*.
- Presiden Republik Indonesia, *Undang-Undang RI No. 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas*.
- Rahayu, Sri dan Utami Dewi. 2013. *Pelayanan Publik Bagi Pemenuhan Hak-Hak Disabilitas di Kota Yogyakarta* dalam Jurnal *Economia*. Universitas Negeri Yogyakarta
- Rowldan, Jo. dalam Buchori, A, Sanusi, dan SR. Amelia (Editor). 2003. *Hanya Sebuah Langkah, Bukan Akhir Perjalanan*. PWD-IPB. Bogor.
- Rukminto Adi, Isbandi. 2013. *Intervensi Komunitas & Pengembangan Masyarakat sebagai upaya pemberdayaan Masyarakat*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Silalahi, Ulbert. 1999. *Metode dan Metodologi Penelitian*, Bandung: Bina Buda.
- Soejono dan Abdurrahman. 2003, *Metode Penelitian Hukum*, cet. ke-3. Jakarta : Rineka Cipta
- S. Suharto, P. Kuipers, dan P. Dorsett. 2016. *Disability terminology and the emergence of 'diffability' in Indonesia* dalam *Disability & Society*, 31 (5).
- Suluh Kusuma Dewi, Dian. 2016. "Model Pemberdayaan Masyarakat Tunagrahita di Kampung Idiot Kabupaten Ponorogo". *Jurnal Otoritas*, Jurnal Ilmu Pemerintahan, Volume 6, No. 1. Ponorogo: Universitas Muhammadiyah Ponorogo.
- Suharto, Edi. 2013. *Kebijakan Sosial sebagai Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta
- 2005. *Membangun Masyarakat, Memberdayakan Rakyat*. Bandung : PT. Retika Adhitama
- Sukatn, Ana. 2011. Implementasi Program Rehabilitasi Disabilitas Fisik (Studi di Pusat Rehabilitasi Terpadu Penyandang Cacat Provinsi DIY). *Tesis*. Magister Administrasi Publik Universitas Gajah Mada Yogyakarta.
- Sumidiningrat, Gunawan. 1999. *Pemberdayaan Masyarakat dan Jaring Pengaman Sosial*. Jakarta: Gramedia
- 2000. *Visi dan Misi pembangunan Pertanian Berbasis Pemberdayaan*, Yogyakarta: IDEA.
- Suryabrata, S. 1998. *Metodologi Penelitian*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada
- Sutanta, Ija. 2010 *Politik Ekonomi Islam, Siyasah Maliyah*. Bandung: Pustaka Setia.

- Suwanti, Arni. Model Pemberdayaan Ekonomi Penyandang Disabilitas di Indonesia. *Jurnal Manajemen Bisnis*, Vol 5, No 1 (2014).
- Potret Upaya Pemberdayaan Ekonomi Difabel Melalui Kewirausahaan dan Pembentukan Koperasi. *Jurnal Difabel*, II, 297-310.
- Suyanto, Bagong. 2005. *Pemberdayaan Komunitas Marginal di Perkotaan* dalam Moh. Aziz et all, *Dakwah Pemberdayaan Masyarakat*, Yogyakarta : PT LKIS Pelangi Aksara.
- Syafi'i M. Salim I. dan N. Elisabeth. 2014. *Indonesia dalam Desa Inklusi: Pembelajaran dari Temu Inklusi 2014*, Yogyakarta: SIGAB.
- Vindiari, Astrid. 2016. Hubungan Pelatihan Vokasioal Dengan Kemandirian Difabel di Yayasan Penyandang Disabilitas Naeema Kabupaten Trenggalek, *Jurnal UNESA*. Vol 5, No 2.
- WHO, dalam Sasiang E. 2010. *Meningkatkan Kualitas Hidup Penyandang Disabilitas*. Yogyakarta: Caritas Germany Country Office Indonesia dan Karitas Keuskupan Agung Semarang.